MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Para Gubernur seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BERWAWASAN LINGKUNGAN

A. Latar Belakang

1. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, dimana Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
2. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Dipindai dengan CamScanner

3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. Sedangkan bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dan dalam rangka mendorong dan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta mengintegrasikan program terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove, maka perlu dibuat Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan memberikan pedoman tentang muatan RPJMD yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Dipindai dengan CamScanner

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi:

1. gubernur, bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan
2. gubernur, bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut;

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

E. Pelaksanaan

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD perlu memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka gubernur, bupati/wali kota dalam menyusun RPJMD wajib:

a. menetapkan target IKLH ke dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
b. menyusun program perbaikan kualitas air, udara, lahan, dan laut untuk meningkatkan nilai IKLH;
c. melakukan pemantauan kualitas lingkungan yang diperlukan untuk menghitung IKLH dengan tahapan menetapkan titik pemantauan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan sesuai dengan metodologi dan parameter yang ditetapkan;
d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik; dan
e. melakukan pelaporan melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup.

Acuan dalam menyusun target IKLH untuk setiap provinsi, kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Dipindai dengan CamScanner

2. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Komponen penting dalam IKLH adalah Indek Kualitas Lahan yang salah satunya dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan dan penurunan permukaan lahan gambut, serta kebakaran yang berpotensi meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka gubernur, bupati/wali kota dalam menyusun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, kabupaten/kota perlu memasukkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Langkah-langkah integrasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada RPJMD dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota dengan:

a. merencanakan program dan kegiatan penyusunan RPPEG provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b. merencanakan program dan kegiatan pembangunan yang berada di ekosistem gambut dilaksanakan dengan memperhatikan penetapan Kesatuan Hidrologis Gambut maupun fungsi eksosistem gambut.

3. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

a. ekosistem mangrove mempunyai nilai penting di Indonesia yaitu sebagai penyangga sistem kehidupan, pencegah dampak kerusakan lingkungan, penyimpan karbon, mitigasi risiko bencana, memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan memiliki fungsi jasa lingkungan.
b. upaya konservasi ekosistem mangrove dapat mengurangi 10% (sepuluh persen) hingga 31% (tiga puluh satu persen) pelepasan emisi karbon tahunan dari sektor penggunaan lahan di Indonesia.
c. ekosistem mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Koservasi Tanah dan Air termasuk dalam kategori lahan prima sehingga konversi lahan prima baik pada kawasan lindung maupun budidaya perlu disusun strategi, arah kebijakan pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Dipindai dengan CamScanner

d. terkait hal itu gubernur dan bupati/wali kota dalam menyusun RPJMD perlu memasukkan:
   1) strategi pengelolaan ekosistem mangrove;
   2) pengendalian, pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan memperhatikan prinsip kelestarian;
   3) rencana rehabilitasi ekosistem mangrove;
   4) penguatan kelompok kerja mangrove dan penguatan forum peduli mangrove; dan
   5) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

F. Penutup

Dalam hal diperlukan konsultasi untuk pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.

Dipindai dengan CamScanner

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	TARGET 2021					TARGET 2022					TARGET 2023					TARGET 2024				
		IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH	IKU	IKA	IKL	IKAL	IKLH
	Jambi																				
6	Kabupaten Sarolangun	84,69	52,60	55,25		**66,18**	84,79	52,70	57,03		**66,64**	84,89	52,80	58,80		**67,11**	84,99	52,90	60,58		**67,58**
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	89,15	61,90	56,09		**71,67**	89,26	61,19	57,70		**71,79**	89,36	61,29	59,31		**72,23**	89,47	61,39	60,92		**72,66**
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	86,00	52,60	52,15		**66,03**	86,10	52,70	54,09		**66,53**	86,20	52,80	56,03		**67,04**	86,30	52,90	57,97		**67,54**
9	Kabupaten Tebo	88,61	52,60	44,20		**65,34**	88,71	52,70	45,81		**65,78**	88,82	52,80	47,42		**66,21**	88,92	52,90	49,02		**66,64**
10	Kota Jambi	79,58	61,90	31,81		**62,47**	79,68	61,19	32,66		**62,43**	79,78	61,29	33,52		**62,70**	79,88	61,39	34,37		**62,96**
11	Kota Sungai penuh	89,38	61,90	89,16		**79,00**	89,49	61,19	89,48		**78,85**	89,59	61,29	89,81		**79,00**	89,70	61,39	90,14		**79,15**
7	**BENGKULU**	90,18	50,24	57,06	70,09	**70,21**	90,28	50,34	58,84	70,69	**70,58**	90,39	50,44	60,62	71,28	**70,95**	90,49	50,54	62,40	71,88	**71,33**
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	92,78	50,24	47,97		**66,97**	92,89	50,34	49,76		**67,44**	93,00	50,44	51,54		**67,92**	93,11	50,54	53,33		**68,39**
2	Kabupaten Bengkulu Tengah	88,37	52,60	28,70		**61,85**	88,47	52,70	31,65		**62,58**	88,57	52,80	34,59		**63,30**	88,67	52,90	37,54		**64,02**
3	Kabupaten Bengkulu Utara	89,25	50,24	59,70		**68,11**	89,36	50,34	61,40		**68,56**	89,46	50,44	63,10		**69,02**	89,57	50,54	64,80		**69,47**
4	Kabupaten Kaur	93,93	50,24	66,39		**71,47**	94,04	50,34	67,78		**71,86**	94,15	50,44	69,17		**72,25**	94,27	50,54	70,55		**72,63**
5	Kabupaten Kepahiang	87,20	50,93	30,79		**61,21**	87,30	51,03	33,70		**61,93**	87,41	51,13	36,62		**62,64**	87,51	51,23	39,54		**63,36**
6	Kabupaten Lebong	95,98	50,24	76,41		**74,50**	96,08	50,34	77,54		**74,82**	96,18	50,44	78,68		**75,15**	96,28	50,54	79,81		**75,47**
7	Kabupaten Mukomuko	90,67	50,24	66,28		**70,13**	90,78	50,34	67,71		**70,52**	90,89	50,44	69,14		**70,92**	91,00	50,54	70,56		**71,31**
8	Kabupaten Rejang Lebong	86,93	50,70	45,48		**64,23**	87,03	50,80	47,85		**64,83**	87,13	50,90	50,22		**65,42**	87,23	51,00	52,59		**66,02**
9	Kabupaten Seluma	88,86	50,24	47,30		**65,24**	88,97	50,34	49,49		**65,80**	89,07	50,44	51,68		**66,36**	89,18	50,54	53,86		**66,92**
10	Kota Bengkulu	87,83	50,24	32,21		**61,52**	87,93	50,34	33,83		**61,95**	88,03	50,44	35,45		**62,38**	88,13	50,54	37,07		**62,82**
8	**SUMATERA SELATAN**	84,55	67,05	38,02	68,24	**70,79**	84,65	67,15	39,86	68,82	**71,17**	84,75	67,25	41,71	69,40	**71,55**	84,85	67,35	43,55	69,97	**71,93**
1	Kabupaten Banyuasin	80,41	55,93	47,71		**64,04**	80,50	56,03	49,08		**64,42**	80,60	56,13	50,45		**64,80**	80,69	56,23	51,82		**65,17**
2	Kabupaten Empat Lawang	88,58	52,60	42,48		**64,96**	88,69	52,70	44,84		**65,55**	88,79	52,80	47,20		**66,15**	88,90	52,90	49,56		**66,75**
3	Kabupaten Lahat	90,25	52,60	46,18		**66,44**	90,36	52,70	48,33		**67,00**	90,47	52,80	50,48		**67,55**	90,58	52,90	52,63		**68,10**

Dipindai dengan CamScanner